

2024



**PEMERINTAH  
KOTA DENPASAR**  
LAPORAN PELAKSANAAN  
PENGELOLAAN RISIKO  
TAHUN 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- e. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar tahun 2022 Nomor 3).
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/09/DP3AP2KB/2022 tentang Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Nomor 188.45/10/DP3AP2KB/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko di Lingkungan Dinas P3AP2KB Kota Denpasar

#### C. Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan Pengelolaan Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Unit Kepatuhan untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.

#### D. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan risiko ini dilakukan terhadap penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian, rancangan informasi dan komunikasi serta rancangan pemantauan yang dilaksanakan tahun 2024.

## BAB II

### Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

#### A. Penetapan Konteks/Tujuan

##### 1) Penetapan konteks strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar mengacu pada:

1. Misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali

Pada Tahun 2024 Dinas P3AP2KB menetapkan 1 tujuan terkait dengan penetapan konteks/tujuan yaitu;

- a. Tujuan Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga.

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan.

IKU Strategis (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG), (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **lampiran 1**.

##### 2) Penetapan konteks operasional Dinas/Badan mengacu pada:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- b. Program Perlindungan Perempuan, Kegiatan 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Keluaran/hasil kegiatan 1. Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Kegiatan 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya, Keluaran/hasil kegiatan 1. Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,

Keluaran/hasil kegiatan Jumlah rapat penyusunan Profil statistik Gender, Penyusunan Profil Statistik Gender, Profil Daerah Responsif Gender, Bimtek penyusunan data terpilah OPD, Penguatan Sistem data Gender dan anak yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.

- e. Program Pemenuhan Hak Anak, Kegiatan 1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, 2.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Keluaran/hasil 1. Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.
  
- f. Program Perlindungan Khusus Anak, Kegiatan (1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; (2) Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota; (3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Keluaran/hasil (1) Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; (2)Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota; (3)Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat

disajikan dalam **Lampiran 2**.

- g. Program Pengendalian Penduduk, Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Keluaran/hasil Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.
  
- h. Program Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB ), Kegiatan  
1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal  
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  
3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/kota  
4. Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB, Keluaran/hasil  
1. Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal  
2. Persentase Faskes teregister yang mendapat ketersediaan Alokasi MKJP , Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangga kencana dalam rangka penurunan unmetneed,  
3. Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update ( CTU ) bagi tenaga medis, kesertaan KB Pria  
4. Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.
  
- i. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS ), Kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluaran/hasil

Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang akan dilakukan penilaian risiko yang dapat disajikan dalam **Lampiran 2**.

#### B. Hasil Identifikasi Risiko

Hasil Identifikasi Risiko Strategis dan operasional Dinas P3AP2KB Kota Denpasar memuat uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) dapat disajikan dalam **lampiran 3**.

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah risiko yang telah teridentifikasi sebanyak 37 risiko dari populasi.

Dari data tersebut diatas juga dapat diidentifikasi jumlah risiko yang dapat dikendalikan (*controllable*) sebanyak 29 buah dari total risiko strategis pemda dan jumlah risiko yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) sebanyak 8 buah dari total risiko strategis dan operasional pemda.

#### C. Hasil Analisis Risiko

Dari 37 risiko yang teridentifikasi (seluruhnya merupakan bagain dari usulan risiko kepada Unit Manajemen Risiko), telah dianalisis dengan hasil jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 8 risiko (21,62% dari 37 risiko), yang merupakan risiko prioritas unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

#### D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Seluruh risiko prioritas telah memiliki *existing control* (sebanyak 8 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas) dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

#### E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Sebanyak 8 risiko prioritas telah memiliki *existing control* namun belum memadai sebanyak 8 risiko atau 100% dari jumlah/populasi risiko prioritas. Daftar analisis risiko dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

### BAB III

#### Rancangan Informasi dan Komunikasi

Sebanyak 6 risiko strategis telah menyajikan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dari total 6 risiko prioritas yang telah diidentifikasi dan memerlukan rancangan informasi dan komunikasi agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan dapat dilihat pada **lampiran 7**.

### BAB IV

#### Rancangan Pemantauan

Dari 6 kegiatan pengendalian yang dibutuhkan telah dirancang mekanisme pemantauan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif, dapat disajikan dalam **lampiran 8**.

BAB V  
Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar Tahun 2024 dapat dilihat bahwa seluruh risiko yang muncul telah ditindaklanjuti.

Analisis manajemen risiko harus dilaksanakan agar dapat mengetahui seberapa besar resiko dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang ditimbulkan.

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Denpasar,



Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660311199503 2 001

# LAMPIRAN


**Form 2.b**  
**Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	2024		
Periode yang Dinilai	Januari - Desember		
Urusan Pemerintahan	(1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
OPD yang Dinilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Sumber Data	Renstra Dinas P3AP2KB Kota Denpasar Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	(1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga. (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang		
Sasaran Strategis	(1) Meningkatkan kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak (2) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan (3) Meningkatkan Keluarga Berkualitas		
IKU Renstra OPD	No		Target
	1	Predikat Kota Layak Anak	Utama
	2	Indeks Pembangunan Gender (IPG )	96,92
	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,21
	4	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	59,69
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga. (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang		
	Sasaran Strategis: (1) Meningkatkan kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap anak; (2) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan; (3) Meningkatkan Keluarga Berkualitas		
	IKU Strategis:		
	Predikat Kota Layak Anak		Utama
	Indeks Pembangunan Gender (IPG )		96,92
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67,21
	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)		59,69
	Program:		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100%
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		100%	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100%	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100%	
Program: PENGENDALIAN PENDUDUK		100%	
Program: PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		100%	
Program: PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		100%	
<p>Denpasar, 2 Januari 2025</p> <p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>Dra. Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si</b> Pembina Utama Muda NIP. 196603111995032 001</p>			

**Form 2.c**  
**Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2024	
Periode yang Dinilai	:	Januari - Desember	
Urusan Pemerintahan	:	(1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
OPD yang Dinilai	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Sumber Data	Renja Tahun 2024		
Tujuan Strategis	(1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga.		
	(2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang		
Program Dinas P3AP2KB			
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	38 orang
	2	Jumlah paket jasa administrasi umum Perangkat daerah yang	4 paket
	3	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	36 unit
	4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan
	5	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	1 laporan
	6	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%
	7	Cakupan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan	100%
	8	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	100%
	9	Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	100%
	10	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	100%
	11	Pembuatan Profil Statistik Gender	1 buku
	12	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,	100%
	13	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	100%
	14	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	100%
	15	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%
	16	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan	100%
	17	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	100%
	18	Cakupan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas	100%
	19	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update ( CTU ) bagi tenaga medis, Akseptor KB , Tenaga Pelayan KB	100%
	20	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber KB	100%
	21	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%
	22	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber KB	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

	<p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan</li> <li>2. Jumlah paket jasa administrasi umum Perangkat daerah yang disediakan</li> <li>3. Jumlah barang milik daerah yang disediakan</li> <li>4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang</li> <li>5. Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</li> </ol>
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><b>PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER</b></p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten / Kota</li> <li>2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada</li> </ol> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point. Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak</li> <li>2. Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ol>
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b></p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan</li> <li>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan</li> <li>2. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b></p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota</li> </ol> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota</li> </ol>
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b></p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Profil Statistik Gender</li> </ol>
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b></p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ol> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ol>
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b></p>

<p>Keluaran/hasil kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota</li> <li>3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ol> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota</li> <li>3. Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ol>
<p>Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Program: PENGENDALIAN PENDUDUK</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah</li> </ol>
<p>Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Program: PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> <li>3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerahKabupaten/kota</li> <li>4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB</li> </ol> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</li> <li>2. Cakupan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</li> <li>3. Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Update ( CTU ) bagi tenaga medis, Akseptor KB , Tenaga Pelayan KB</li> <li>4. Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB</li> </ol>
<p>Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Program: PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> </ol> <p>Keluaran/ Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>2. Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Denpasar, 2 Januari 2025</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar</p> <div style="text-align: center;">  <p><b>Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si</b> Pembina Utama Muda NIP : 19660311 199503 2 001</p> </div>	

Form 3.b  
Identifikasi Risiko Strategis OPD

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Sebab			Dampak	
				Kode	Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CIUC	Uraian
1	Tujuan: Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; Sasaran: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; Sasaran: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Pemenuhan dokumen pendukung PUG oleh OPD tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSO.24.08.13.01	Kepala Dinas P3AP2KB	Kurangnya sosialisasi dan penetapan batas waktu pengumpulan dokumen yang dimaksud	Internal	C	Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Denpasar Masyarakat.	Pemerintah Kota Denpasar, Stakeholder, Masyarakat.
2	Tujuan: Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; Sasaran: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan Komprehensif	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	RSO.24.08.13.02	Kepala Dinas P3AP2KB	1. Lemahnya pengawasan pelaporan online 2. Kurangnya kompetensi petugas layanan	Internal	C	Layanan pengaduan kasus tidak mencapai target (100%)	DP3AP2KB
3	Tujuan: Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; Sasaran: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Persentase Desa/ Kelurahan yang dapat melaksanakan pendampingan kualitas keluarga (Terbentuk PUSPAGA Desa Lurah)	Pendampingan puspaga desa /lurah belum terlaksana dengan maksimal	RSO.24.08.13.03	Kepala Dinas P3AP2KB	Kurangnya SDM Puspaga	Internal	C	Puspaga desalurah belum berfungsi secara maksimal	DP3AP3KB
4	Tujuan: Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; Sasaran: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan	Persentase data terpelih Gender dan Anak pada OPD	Pembuatan buku profil statistik gender tidak tepat waktu	RSO.24.08.13.04	Kepala Dinas P3AP2KB	Pengumpulan data dari stake holder terkait, kurang tepat waktu	Eksternal	C	Proses penyusunan buku profil statistik gender terhambat	DP3AP3KB

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar  
 Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Periode yang dinilai : Januari-Desember  
 Tujuan Strategis : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengedukasi Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang  
 Urusan Pemerintahan : (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5	Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga. Sasaran : Meningkatkan kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunkannya segala bentuk kekerasan terhadap anak	Cakupan Indikator KLA	Tidak tercapainya indikator Kota Layak Anak (KLA)	RSO 24.08.13.05	Kepala Dinas P3AP2KB	1. Lemahnya pengawasan untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Nilai indikator KLA tidak tercapai	DP3AP2KB
6	Tujuan : Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga. Sasaran : Meningkatkan kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menurunkannya segala bentuk kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat Layanan komprehensif	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	RSO 24.08.13.06	Kepala Dinas P3AP2KB	1. Lemahnya pengawasan pelaporan online 2. Kurangnya kompetensi petugas layanan	Internal	C	Layanan pengaduan kasus tidak mencapai target (100%)	DP3AP3KB
7	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang. Sasaran : Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCP), unmetneed	Penyediaan data tidak terpenuhi	RSO 24.14.13.07	Kepala Dinas P3AP2KB	Pergantian aplikasi pencatatan sehingga perlu pelatihan ulang	Internal	C	Penyediaan data tidak sesuai target	DP3AP2KB
8	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang. Sasaran : Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCP), unmetneed	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	RSO 24.14.13.08	Kepala Dinas P3AP2KB	Target yang ditetapkan dari pusat terlalu tinggi	eksternal	UC	Realisasi anggaran tidak maksimal karena jumlah akseptor tidak terprediksi	DP3AP2KB
9	Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang. Sasaran : Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter (BKB, BKR, BKL)	Terjadinya pergantian kader pada Tahun Anggaran berjalan	RSO 24.14.13.09	Kepala Dinas P3AP3KB	Terjadinya pergantian kader	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh kader BKB, BKR, BKL tidak optimal	DP3AP2KB

Denpasar, 2 Januari 2025  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar  
 Dr. J. Gusti Agung Sri Weirawati, M. SI  
 NIP. 19660311199503 2 001

Form 3.c  
Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Kegiatan	Tahap	Uraian Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	Pihak yang Terkena
						Uraian	Sumber			
: Pemerintah Kota Denpasar : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : 2024 : Januari-Desember : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengedalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang : (1) Meningkatkan kapasitas lembaga Pemenuhan Hak Anak dan menununya segala bentuk kekerasan terhadap anak; (2) Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam pembangunan; (3) Meningkatkan Keluarga Berkualitas										
: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
A	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	c	Layanan Kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.08.13.01	Sekretaris	h	Terjadi masalah dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya antara pejabat yang berwenang dan staf yang menangani	C	Belum optimalnya pemenuhan layanan administrasi kesekretariatan	DP3AP2KB
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	d	Kekurangan Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan karena adanya mutasi masuk pegawai	ROO.24.08.13.02	Kasubag Umum dan Keuangan	e	Tidak dapat memprediksi mutasi masuk pegawai	C	Pegawai yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan gaji dan lunjangan	ASN bersangkutan, Berdahara gaji, Kasubag
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	d	Serapan anggaran tidak optimal	ROO.24.08.13.03	Kasubag Umum dan Keuangan	e	SPJ Tidak tepat waktu	C	Tertundanya pembayaran tagihan air listrik belum akbal anggaran tidak terpenuhi	Kasubag Umum dan Keuangan
4	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	d	Realisasi belanja modal tidak maksimal	ROO.24.08.13.04	Kasubag Umum dan Keuangan	e	Standar Harga SSH lebih rendah dari harga di lapangan	C	Anggaran Pengadaan barang Milik Daerah tidak dapat direalisasikan	Kasubag Umum dan Keuangan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	d	Penyerapan belanja jasa telepon tidak optimal	ROO.24.08.13.05	Kasubag Umum dan Keuangan	e	Sulitnya memprediksi jasa telepon di balai penyuluh	C	Anggaran tidak semua dapat terrealisasi	Kasubag Umum dan Keuangan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	d	Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar	ROO.24.08.13.06	Kasubag Umum dan Keuangan	e	Umur barang elektronik tersebut sudah melebihi 5 tahun	C	Pegawai tidak dapat menggunakan barang elektronik tersebut untuk menyelesaikan	Kasubag Umum dan Keuangan
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN										

7	Kegiatan Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah advokasi Penguatan Kelompok Kerja PUG, Driver, Tim Teknis dan Focal Point, Pemilihan Perangkat daerah, Desa dan Kelurahan pelaksana PUG terbaik. Terbentuknya Desa Ramah Perempuan dan Anak	Pelaksanaan	Keterlambatan dalam pengumpulan GAP dan GBS	ROO 24.08.13.07	Kabid KHPKDI	Kurangnya pemahaman terkait penyusunan Gender Analysis Budget	Eksternal	C	Belum optimalnya pelaksanaan PUG di Kota Diripasar	DP3AP2KB
8	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan	Kesulitan dalam menghadirkan peserta	ROO 24.08.13.08	Kabid KHPKDI	Karena peserta kebanyakan bu rumah tangga dan UMK, yang memiliki kepentingan keluarga, adat dan kepentingan lainnya	Eksternal	C	Kehadiran peserta tidak sesuai target dan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal	DP3AP3KB
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>										
9	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Daerah	Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 24.08.13.09	Kabid PHP PKA	peserta memiliki prioritas kegiatan lain (Upacara Keagamaan)	Eksternal	C	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	ASN Bendahara gaji, Kasubag
10	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi tingkat Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi tingkat Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	ROO 24.08.13.10	Kepala UPTD PPA	1. Lemahnya pengawasan pelaporan online 2. Kurangnya kompetensi petugas layanan	Internal	C	Layanan pengaduan kasus tidak mencapai target (100%)	DP3AP2KB
11	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 24.08.13.11	Kabid PHP PKA	peserta memiliki prioritas kegiatan lain seperti : Upacara Keagamaan, pekerjaan lain, kegiatan lain yang harus diikuti di waktu bersamaan dll	Eksternal	C	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>										
12	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Peningkatan Kualitas keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kesulitan dalam menghadirkan peserta	ROO 24.08.13.12	Kabid KHPKDI	Karena peserta melibatkan bu rumah tangga yang memiliki kepentingan keluarga, adat dan kepentingan lainnya	Eksternal	C	Kehadiran peserta tidak sesuai target dan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal	DP3AP2KB
13	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	Cakupan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota	Pelaksanaan	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO 24.08.13.13	Kabid KHPKDI	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan	Internal	C	SPJ Tidak Tepat waktu	DP3AP2KB
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>										

14	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Profil Statistik Gender		ROO 24.08.13.14	Kabid KHPKDI	Pengumpulan data dari stabe holder terkait, kurang tepat waktu	Eksternal	C	Proses penyusunan buku profil statistik gender terhambat	DP3AP2KB
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>									
15	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	ROO 24.08.13.15	Kabid PHA	Kehadiran peserta tidak sesuai dg luca peserta	Eksternal	C	Peserta yang hadir kurang dan target	DP3AP2KB
16	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	ROO 24.08.13.16	Kabid PHA	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas	Eksternal	C	Mundurinya pelaksanaan kegiatan dan rencana	DP3AP2KB
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>									
17	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Derah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan	ROO 24.08.13.17	Kepala UPTD PPA	Keterbatasan respon kasus oleh petugas layanan	Internal	C	Layanan pengaduan kasus tidak mencapai target (100%)	DP3AP2KB
18	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan	ROO 24.08.13.18	Kabid PHP PKA	Tempat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai perencanaan	Eksternal	C	Tempat pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUKUK</b>									
19	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	ROO 24.14.13.19	Kabid Daiduk	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	eksternal	UC	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB
	<b>PROGRAM PEMINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>									
20	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan	ROO 24.14.13.20	Kabid Daiduk	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	eksternal	UC	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB

21	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase lesket terregistrasi yang mendapat ketersediaan Alokon, Persentase Penyebarluasan materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan unmetneed	Pertanggungjawaban	Tidak terealisasinya belanja modal	ROO 24.14.13.21	Kabid Daiduk	Tidak tersedianya barang sesuai juknis / TKDN	eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	DP3AP2KB
22	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah/Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Jumlah peserta pelatihan Contraception Technology Upate (CTU) bagi tenaga medis, Aseptor KB, Tenaga Pelayan KB	Pelaksanaan	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	ROO 24.14.13.22	Kabid KBKKK	Target yang ditetapkan dari pusat terlalu tinggi	eksternal	UC	Realisasi anggaran tidak maksimal karena jumlah akseptor tidak terprediksi	DP3AP2KB
23			Pertanggungjawaban	Tidak terealisasinya belanja modal	ROO 24.14.13.23	Kabid Daiduk	Tidak tersedianya barang sesuai juknis / TKDN	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	DP3AP2KB
24	Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Pelaksanaan	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 24.14.13.24	Kabid Daiduk	peserta memiliki prioritas kegiatan - kegiatan lain seperti : Upacara Keagamaan, pekerjaan lain, kegiatan lain yang harus diluldi di waktu bersamaan dll	eksternal	UC	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											
25	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan	Peserta belum paham dengan tugas	ROO 24.14.13.25	Kabid KBKKK	Peserta dan berbagai bidang ilmu sehingga pemahaman dalam menyikapi maksud dan tujuan kegiatan belum dipahami	Internal	C	Target kegiatan tidak terpenuhi	DP3AP2KB
26	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Pelaksanaan	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 24.14.13.26	Kabid KBKKK	peserta memiliki prioritas kegiatan - kegiatan lain seperti : Upacara Keagamaan, pekerjaan lain, kegiatan lain yang harus diluldi di waktu bersamaan dll	eksternal	UC	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan	DP3AP2KB

Depasas - Tahun 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

*(Handwritten Signature)*

Dra. I Gusti Ayu Sri Wahyuni, M. Si  
Kabid/Plu/Keluarga Muda  
NIP. 196503 2 001

q

**Form 4**  
**Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: 2024				
Tujuan Strategis	: (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang				
Urusan Pemerintahan	: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
<b>Analisis Risiko</b>					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemda</b>				
1	Pemenuhan dokumen pendukung PUG oleh OPD tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSP.24.08.13.01	4	4	16
2	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	RSP.24.14.13.08	4	5	20
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>				
1	Pemenuhan dokumen pendukung PUG oleh OPD tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSO.24.08.13.01	4	4	16
2	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	RSO.24.08.13.02	2	1	2
3	Pendampingan puspaga desa /lurah belum terlaksana dengan maksimal	RSO.24.08.13.03	2	4	8
4	Pembuatan buku profil statistik gender tidak tepat waktu	RSO.24.08.13.04	4	3	12
5	Tidak tercapainya indikator Kota Layak Anak (KLA)	RSO.24.08.13.05	2	1	2
6	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	RSO.24.08.13.06	2	1	2
7	Penyediaan data tidak terpenuhi	RSO.24.14.13.07	2	1	2
8	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	RSO.24.14.13.08	4	5	20
9	Terjadinya pergantian kader pada Tahun Anggaran berjalan	RSO.24.14.13.09	2	1	2
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>				
1	Layanan Kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.24.08.13.01	2	2	4
2	Kekurangan Anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan karena adanya mutasi masuk pegawai	ROO.24.08.13.02	2	1	2
3	Serapan anggaran tidak optimal	ROO.24.08.13.03	2	1	2
4	Realisasi belanja modal tidak maksimal	ROO.24.08.13.04	3	5	15
5	Penyerapan belanja jasa telepon tidak optimal	ROO.24.08.13.05	2	1	2
6	Barang elektronik yang memerlukan perbaikan besar	ROO.24.08.13.06	3	3	9
7	Keterlambatan dalam pengumpulan GAP dan GBS	ROO.24.08.13.07	4	3	12
8	Kesulitan dalam menghadirkan peserta	ROO.24.08.13.08	4	3	12
9	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO.24.08.13.09	2	4	8
10	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	ROO.24.08.13.10	2	1	2
11	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO.24.08.13.11	2	4	8
12	Kesulitan dalam menghadirkan peserta	ROO.24.08.13.12	2	4	8
13	Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.24.08.13.13	2	3	6
14	Kesulitan dalam pencarian data	ROO.24.08.13.14	4	3	12
15	Kehadiran peserta tidak sesuai dg kuota peserta	ROO.24.08.13.15	2	4	8
16	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas	ROO.24.08.13.16	2	4	8
17	Keterlambatan respon kasus oleh petugas layanan	ROO.24.08.13.17	2	1	2
18	Tempat pelaksanaan kegiatan tidak sesuai	ROO.24.08.13.18	2	5	10

19	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 24.14.13.19	2	4	8
20	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 24.14.13.20	2	4	8
21	Tidak terealisasinya belanja modal	ROO 24.14.13.21	4	5	20
22	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	ROO 24.14.13.22	4	5	20
23	Tidak terealisasinya belanja modal	ROO 24.14.13.23	4	5	20
24	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 24.14.13.24	5	2	10
25	Peserta belum paham dengan tugas	ROO 24.14.13.25	4	2	8
26	Kehadiran peserta tidak sesuai harapan	ROO 24.14.13.26	3	4	12

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kota Denpasar

  
Dra. **Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196603111995032001

**Form 5**  
**Daftar Risiko Prioritas PEMDA**

Nama Pemda Tahun Penilaian	Pemerintah Daerah Kota Denpasar 2024					
Tujuan Strategis	(1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang					
Urusan Pemerintahan	(1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda					
1	Pemenuhan dokumen pendukung PUG oleh OPD tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSP.24.08.13.01	16	Pemerintah Kota Denpasar	Kurangnya sosialisasi dan penetapan batas waktu pengumpulan dokumen yang dimaksud	Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Denpasar
2	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	RSP.24.14.13.08	20	Pemerintah Kota Denpasar	Target yang ditepkan dari pusat terlalu tinggi	Realisasi anggaran tidak maksimal karena jumlah akseptor tidak terprediksi
II	Risiko Strategis OPD					
1	Pemenuhan dokumen pendukung PUG oleh OPD tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSO.24.08.13.01	16	Kepala Dinas P3AP2KB	Kurangnya sosialisasi dan penetapan batas waktu pengumpulan dokumen yang dimaksud	Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kota Denpasar
2	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	RSO.24.14.13.08	20	Kepala Dinas P3AP2KB	Target yang ditepkan dari pusat terlalu tinggi	Realisasi anggaran tidak maksimal karena jumlah akseptor tidak terprediksi
II	Risiko Operasional OPD					
1	Realisasi belanja modal tidak maksimal	ROO.24.08.13.04	15	Kasubag Umum dan Keuangan	Standar Harga SSH lebih rendah dari harga di lapangan	Anggaran Pengadaan barang Milik Daerah tidak dapat direalisasikan
2	Tidak terealisasinya belanja modal	ROO.24.14.13.21	20	Kabid Dalduk	Tidak tersedianya barang sesuai juknis / TKDN	Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
3	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	ROO.24.14.13.22	20	Kabid KBKKK	Target yang ditepkan dari pusat terlalu tinggi	Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
4	Tidak terealisasinya belanja modal	ROO.24.14.13.23	20	Kabid Dalduk	Tidak tersedianya barang sesuai juknis / TKDN	pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan dan harapan

Denpasar, 2 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



**Dra I Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si**  
Pemula Utama Muda  
NIP : 19660311-199503 2 001

Form 7  
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		Rencana Kerja		Rencana Kerja		Rencana Kerja		Rencana Kerja		Rencana Kerja		Rencana Kerja	
Tahun Penilaian		2024		2024		2024		2024		2024		2024	
Jumlah Strategi		1		1		1		1		1		1	
Urutan Pemerintahan		1		1		1		1		1		1	
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada 1)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Tingkat Waktu Penyelesaian						
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>													
1	Pemenuhan dokumen pendukung PUG oleh OPD tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSP.24.06.13.01	Evaluasi oleh inspektorat Kota Denpasar	Monitoring secara berkala terkait pengumpulan dokumen	Monitoring dan Evaluasi melalui Gender Equality Award (GEA)	Kepala Dinas	TW II						
2	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	RSP.24.14.13.08	Penyesuaian jumlah target MKJP ke pusat	Sosialisasi dan Pembinaan	Sosialisasi dan Pembinaan kader dan petugas KB	Kepala Dinas	TW II-IV						
<b>II Risiko Strategis OPD</b>													
1	Pemenuhan dokumen pendukung PUG oleh OPD tidak lengkap dan tidak tepat waktu	RSO.24.06.13.01	Pengumpulan dokumen melalui google drive dan whatsapp	Monitoring secara berkala terkait pengumpulan dokumen	Monitoring dan Evaluasi melalui Gender Equality Award (GEA)	Kepala Dinas	TW II						
2	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	RSO.24.14.13.08	Penyesuaian jumlah target MKJP ke pusat	Sosialisasi dan Pembinaan	Sosialisasi dan Pembinaan kader dan petugas KB	Kepala Dinas	TW II-IV						
<b>III Risiko Operasional OPD</b>													
1	Realisasi belanja modal tidak maksimal	ROO.24.06.13.04	Survey harga, ketersediaan barang dan TKDN melalui e-katalog	Monitoring secara berkala terkait pengadaan belanja modal	Rapat persiapan pengadaan belanja modal	Sekretaris	TW I						
2	Tidak terealisasinya belanja modal	ROO.24.14.13.21	Survey harga, ketersediaan barang dan TKDN melalui e-katalog	Monitoring secara berkala terkait pengadaan belanja modal	Rapat persiapan pengadaan belanja modal	Kabid Dalduk	TW I						
3	Realisasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tidak terpenuhi	ROO.24.14.13.22	Penyesuaian jumlah target MKJP ke pusat	Sosialisasi dan Pembinaan	Sosialisasi dan Pembinaan kader dan petugas KB	Kabid KBKKK	TW II-IV						
4	Tidak terealisasinya belanja modal	ROO.24.14.13.23	Survey harga, ketersediaan barang dan TKDN melalui e-katalog	Monitoring secara berkala terkait pengadaan belanja modal	Rapat persiapan pengadaan belanja modal	Kabid Dalduk	TW I						

Denpasar, 2 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar

*(Signature)*  
Dra. I Gusti Agung Sri Widyawati, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196503111985032.001

## RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2024 : (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang					
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Monitoring dan Evaluasi melalui Gender Equality Award (GEA)	Monev	DP3AP2KB	OPD se-Kota Denpasar	TW II	21 Juni 2024	Tertuang dalam Laporan MR TW II
2	Sosialisasi dan Pembinaan kader dan petugas KB	Rapat	DP3AP2KB	PKB dan PLKB	TW II-IV	6 Mei 2024, 21 Mei 2024, 4 Juni 2024, 12 Juni 2024	Dokumentasi terlampir
3	Rapat persiapan pengadaan belanja modal	Rapat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	PPTK	TW I	27 Maret 2024	Tertuang dalam Laporan MR TW I
4	Rapat persiapan pengadaan belanja modal	Rapat	DP3AP2KB	PPTK	TW I	27 Maret 2024	Tertuang dalam Laporan MR TW I
5	Sosialisasi dan Pembinaan kader dan petugas KB	Rapat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	PKB dan PLKB	TW II-IV	6 Mei 2024, 21 Mei 2024, 4 Juni 2024, 12 Juni 2024	Dokumentasi terlampir
6	Rapat persiapan pengadaan belanja modal	Rapat	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	PPTK	TW I	27 Maret 2024	Tertuang dalam Laporan MR TW I

Denpasar, 2 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kota Denpasar

  
Dra f Gusti Agung Sri Wetrawati, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19660311 199503 2 001

## RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis		Pemerintah Daerah Kota Denpasar : 2024 (1) Meningkatkan pelaksanaan dan pemahaman kesetaraan gender Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak serta Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Keluarga Berkualitas serta mengendalikan Struktur Penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang				
Urusan Pemerintahan		: (1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; (2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Monitoring dan Evaluasi melalui Gender Equality Award (GEA)	Monev	Kepala Dinas	TW II	21 Juni 2024	Tertuang dalam Laporan MR TW II
2	Sosialisasi dan Pembinaan kader dan petugas KB	Rapat	Kepala Dinas	TW II-IV	6 Mei 2024, 21 Mei 2024, 4 Juni 2024, 12 Juni 2024, 2 Juli 2024, 15 Agustus 2024, 23 Agustus 2024, 24 Agustus 2024, 18 September 2024, 27 September 2024	Dokumentasi TW II tertuang dalam Laporan MR TW II, Dokumentasi TW III terlampir
3	Rapat persiapan pengadaan belanja modal	Laporan/ notulen	Kepala Dinas	TW I	27 Maret 2024	Tertuang dalam Laporan MR TW I
4	Rapat persiapan pengadaan belanja modal	Laporan/ notulen	Kepala Dinas	TW I	27 Maret 2024	Tertuang dalam Laporan MR TW I
5	Sosialisasi dan Pembinaan kader dan petugas KB	Rapat	Kepala Dinas	TW II-IV	6 Mei 2024, 21 Mei 2024, 4 Juni 2024, 12 Juni 2024, 2 Juli 2024, 15 Agustus 2024, 23 Agustus 2024, 24 Agustus 2024, 18 September 2024, 27 September 2024	Dokumentasi TW II tertuang dalam Laporan MR TW II, Dokumentasi TW III terlampir
6	Rapat persiapan pengadaan belanja modal	Laporan/ notulen	Kepala Dinas	TW I	27 Maret 2024	Tertuang dalam Laporan MR TW I

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota DenpasarDra. Gusti Agung Sri Wetrwati, M. SI

Pembina Utama Muda

NIP. : 19660311199503 2 001